

**PENGARUH KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA SELATAN PERIODE
2005-2014**

Juairiah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : genot@gmail.com

Info Artikel :

Diterima 28 Mei 2017
Direview 28 Mei 2017
Disetujui 20 Juni 2017

ABSTRACT

Purpose – *The study aims to determine how the influence of financial capacity of region on economic growth in Southern Sumatran Region in period 2005 to 2014.*

Design/methodology - *The analysis was performed by multiple regression analysis models by a Pooled Least Square method and the fixed effect estimation models. The data used is panel data of five provinces in Southern Sumatra.*

Findings – *The analysis showed that the financial capacity in Southern Sumatra region is significantly affecting the economic growth.*

Keyword :

*Financial Capacity
Economic Growth*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia di era setelah orde baru terasa lebih efektif dilaksanakan pada tahun 2001. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-undang otonomi daerah yang baru yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Hariyanto, 2012: 2).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), serta Penyesuaian. Dana Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan

urusan pemerintahan antardaerah (Nota Keuangan RAPBN 2013). Selain transfer dana ke daerah yang mengalami peningkatan secara drastis, desentralisasi dan otonomi daerah juga diwarnai dengan adanya fenomena pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru.

Dengan bertambahnya wilayah administrasi di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung serta ditambah dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk mengurus pemerintahannya, maka jumlah dana dari pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan dana perimbangan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien. Sehingga diharapkan menjadi suatu dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Namun bagaimana waktu untuk persiapan penyesuaian diri bagi daerah baru tersebut sudah tercukupi sehingga pelaksanaan bisa berhasil. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Kaho, 1998: 34-36), yakni :

faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajemen. Faktor-faktor tersebut harus dipersiapkan oleh daerah secara cermat dan terencana.

Proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakantanggung jawab serta tantangan pihak stakeholder (pemerintah) yang menjadi subjek (ikut berperan aktif) dan objek (sasaran) pembangunan di daerah tersebut. Proses anggaran daerah yang selama ini digunakan oleh pemerintah adalah berdasarkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan pendekatan dari atas (top down approach) sesuai dengan siklus anggaran. Sedangkan untuk sekarang pendekatan yang digunakan sebaiknya lebih ditekankan pada pendekatan bawah (bottom up approach).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan media pemerintah daerah untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih diperuntukkan pada kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki untuk memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Semakin tinggi investasi modal, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah yang sudah dijalankan pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera bagian selatan khususnya dirasakan masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan pertumbuhan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesiapan dari masing-masing daerah yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan periode tahun 2005 sampai dengan 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengamati dan meneliti tentang pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah antarprovinsi di wilayah Sumatera bagian selatan. Sedangkan periode analisis terdiri dari sepuluh tahun yang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2014 serta dengan menggunakan lima provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan. Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang sangat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi kenyataannya, wilayah Sumatera hanya menyumbang 23,77% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya indikasi permasalahan ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi belum memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk panel, dimana data cross section meliputi data keuangan daerah provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan dan data time series dengan rentang waktu tahun 1996 sampai dengan 2014. Data yang digunakan pada penelitian ini dipublikasikan oleh situs resmi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data yakni pengambilan data melalui dokumen tertulis baik berupa angka maupun keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian. Definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan daerah.
2. Variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_2) mencerminkan tingkat efisiensi daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) mencerminkan keadaan perekonomian suatu daerah.

Setelah mengestimasi model dengan salah satu metode regresi data panel yang tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau uji spesifikasi model. Langkah ini perlu untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun sudah tepat baik menurut

kriteria ekonometrika, kriteria statistik dan kriteria ekonomi.

Kriteria Ekonometrika (Uji Asumsi Klasik)

Metode regresi linear merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual (nyata). Oleh karena itu harus diuji dengan beberapa uji asumsi sebagai berikut : uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan heterokedastisitas.

Kriteria Statistik

Untuk mendapatkan model yang baik, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria statistik yang meliputi :

1. Uji koefisien determinasi (R^2), Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Uji t, Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3. Uji F, Sedangkan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria Ekonomi

Evaluasi model berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan untuk melihat apakah model yang diestimasi telah sesuai dengan teori ekonomi, dengan cara melihat tanda dan besaran koefisien parameter yang

menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sudah sesuai dengan teori ekonomi maupun penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi ataupun kegiatan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir semua kegiatan pemerintahan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah. Semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan semakin banyak juga kemungkinan program atau kegiatan pemerintahan yang dapat dilaksanakan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, serta memanfaatkan penerimaan tersebut untuk membiayai program-program pembangunan daerah yang tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Kemampuan keuangan masing-masing daerah pada umumnya berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Begitu juga dengan masing-masing provinsi di wilayah Sumatera yang menunjukkan

beragam perbedaan baik dari sisi penerimaan daerah maupun belanja daerahnya. Secara umum total penerimaan daerah baik di wilayah Sumatera bagian selatan maupun

Indonesia meningkat setiap tahunnya. Adapun perkembangan penerimaan daerah di setiap provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Daerah di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PROVINSI					PULAU SUMATERA	INDONESIA
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEP.BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG		
`2001	1.521.003,54	3.094.104,97	531.897,19	847.517,20	2.440.467,48	27.355.732,14	109.365.751,57
`2002	2.213.185,86	3.871.176,08	886.814,34	1.021.268,55	3.174.424,41	34.297.672,14	136.251.506,77
`2003	2.880.481,12	4.513.084,32	866.936,14	1.345.051,77	3.372.954,72	40.828.569,61	155.194.120,93
`2004	2.534.213,16	5.058.639,50	1.120.528,97	1.305.373,69	3.323.228,63	39.677.466,48	157.840.150,06
`2005	2.551.325,20	5.934.801,14	1.199.710,56	1.063.502,91	3.739.672,85	47.055.700,88	180.007.531,49
`2006	5.029.068,86	9.405.815,38	2.380.509,55	2.432.812,51	6.535.816,11	76.056.292,58	247.548.604,00
`2007	5.780.615,58	10.986.959,42	2.919.757,78	3.386.021,95	7.282.434,83	77.608.953,34	285.408.292,65
`2008	6.520.573,52	12.487.313,22	3.733.417,31	4.565.661,67	8.285.523,99	103.366.765,75	376.434.207,24
`2009	6.675.988,73	12.392.612,43	3.548.155,00	4.501.003,18	8.349.054,31	100.372.334,91	393.083.164,65
`2010	8.017.502,30	15.473.142,62	3.534.726,31	5.038.770,91	10.473.895,16	117.256.926,73	448.821.059,26
`2011	9.636.456,55	19.232.421,49	4.836.184,57	5.890.868,82	13.367.178,04	143.015.554,91	546.799.831,17
`2012	11.386.766,00	22.834.812,00	5.444.339,00	6.681.792,00	15.900.414,00	165.401.745,00	629.224.153,00

Sumber : Diolah dari DJPK

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan yang penerimaan setiap tahunnya bahkan penerimaan daerah di Sumatera tahun 2012 mencapai enam kali dari penerimaan di tahun 2001. Rata-rata penerimaan daerah terbesar terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk dan luas daerahnya maka akan semakin besar juga jumlah penerimaan daerahnya. Sedangkan besarnya rata-rata kontribusi penerimaan daerah

Sumatera terhadap total penerimaan pusat adalah 26,52 persen.

Selain realisasi penerimaan, terdapat realisasi pengeluaran daerah yang biasanya akan mengikuti besarnya jumlah realisasi penerimaan, dimana daerah yang kapasitas penerimaan daerahnya besar cenderung memiliki realisasi pengeluaran daerah yang besar juga. Berikut tabel perkembangan pengeluaran daerah untuk masing-masing provinsi di wilayah Sumatera.

Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Daerah di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PROVINSI					PULAU SUMATERA	INDONESIA
	JAMBI	SUMATERA SELATAN	KEP.BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG		
`2001	1.349.741,42	2.733.499,54	415.491,32	777.014,05	2.224.657,19	23.340.684,47	93.272.284,26
`2002	1.916.381,21	3.379.406,58	748.250,36	893.426,02	2.846.945,88	29.222.854,60	116.870.899,31
`2003	2.498.006,04	2.106.791,28	96.112,59	807.845,20	3.074.918,07	25.834.585,19	70.925.265,27
`2004	878.258,25	518.511,02	326.775,70	352.301,76	426.681,78	9.124.927,68	28.722.396,47
`2005	452.833,64	1.436.017,41	464.471,94	90.153,92	605.314,01	13.562.616,24	36.255.485,12
`2006	915.846,00	1.791.351,80	813.220,42	307.780,06	715.390,72	20.250.907,22	48.420.598,76
`2007	5.457.124,10	11.245.444,64	2.675.597,16	3.655.424,43	7.614.360,66	83.409.355,14	307.398.119,44
`2008	6.840.867,88	12.645.030,33	3.453.161,16	4.743.349,74	8.184.818,91	100.305.821,05	366.951.082,58
`2009	6.975.371,23	12.050.714,48	3.646.882,63	4.521.269,34	8.344.152,65	106.249.833,15	395.593.271,19
`2010	7.275.285,77	13.690.241,24	3.650.949,97	4.859.021,49	9.729.676,06	110.523.608,73	420.769.789,63
`2011	8.584.787,03	17.665.385,82	4.111.922,96	5.557.422,11	13.050.995,30	132.415.884,48	500.902.581,51
`2012	10.554.442,00	21.169.584,00	4.946.423,00	6.330.030,00	15.512.562,00	154.766.153,00	575.608.282,00

Sumber : Diolah dari DJPK

Begitu juga dengan realisasi pengeluaran daerah di Sumatera yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah realisasi pengeluaran di tahun 2012 untuk wilayah Sumatera mencapai 6,5 kali jumlahnya dibandingkan jumlah realisasi pengeluaran di tahun 2001. Sedangkan rata-rata pengeluaran daerah yang terbesar masih terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Besaran persentase pengeluaran daerah terhadap penerimaan daerah di wilayah Sumatera adalah sebesar 83,2 persen. Besarnya persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase nasional yang sebesar 80,78 persen.

Implementasi Kemampuan Keuangan Daerah di Wilayah Sumatera bagian Selatan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan mulai tahun 2001. Sesuai prinsip *money follow function* dalam desentralisasi fiskal, maka

untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diberikan sumber-sumber pendanaan terutama melalui dana perimbangan oleh pemerintah pusat. Sehingga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas penerimaan dan pengeluaran seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Pada tabel sebelumnya, yakni tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada penerimaan dan pengeluaran daerah. Akan tetapi, peningkatan jumlah penerimaan masing-masing provinsi tersebut tidak diiringi dengan kemandirian daerah dalam membiayai pengeluarannya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan komposisi atau struktur penerimaan daerah serta pendapatan asli daerah pada tahun 2001 dan 2012 yang masih menunjukkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah serta Kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah antar Provinsi di Sumatera bagian selatan

No.	PROVINSI	Perkembangan Dana Perimbangan				Perkembangan Pendapatan Asli Daerah			
		2001		2012		2001		2012	
		Jumlah (Juta Rp)	Persen thd Penerimaan Daerah	Jumlah (Juta Rp)	Persen thd Penerimaan Daerah	Jumlah (Juta Rp)	Persen thd Penerimaan Daerah	Jumlah (Juta Rp)	Persen thd Penerimaan Daerah
1	JAMBI	1.253.889,77	82,44	8.606.497,07	75,58	157.040,29	10,32	1.457.040,69	12,80
2	SUMATERA SELATAN	2.559.203,68	82,71	16.594.956,39	72,67	287.098,09	9,28	3.265.248,15	14,30
3	KEP.BANGKA BELITUNG	422.427,14	79,42	4.031.095,75	74,04	51.892,31	9,76	762.579,27	14,01
4	BENGKULU	748.686,48	88,34	5.274.825,06	78,94	60.764,62	7,17	671.363,87	10,05
5	LAMPUNG	2.104.759,56	86,24	10.795.348,51	67,89	208.085,00	8,53	2.411.009,72	15,16
	SUMATERA	22.761.588,23	83,21	113.956.689,79	68,90	2.374.920,73	8,68	24.058.814,01	14,55
	INDONESIA	83.742.029,62	76,57	391.983.912,18	62,30	15.161.824,19	13,86	130.826.107,06	20,79

Sumber : Diolah dari DJPK

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan untuk Sumatera bagian selatan masih besar dan di atas rata-rata nasional. Walaupun ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut mengalami penurunan, namun tidak terlalu besar persentasenya sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Di sisi lain, sumber penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah menunjukkan kenaikan secara nominal. Akan tetapi, kontribusi di wilayah Sumatera bagian selatan tahun 2012 masih dibawah dari persentase nasional sehingga dapat menunjukkan bahwa kemandirian wilayah Sumatera bagian selatan dalam membiayai daerahnya masih dibawah rata-rata nasional.

Hasil Pengujian Metode Analisis

Dengan pertimbangan bahwa jumlah data *cross section* yang berjumlah lima provinsi sedangkan jumlah *time series* sebanyak sepuluh tahun, maka analisis regresi berganda yang digunakan adalah dengan metode *Fixed Effect*. Akan tetapi untuk meyakinkan ketepatan penggunaan metode *Fixed effect* tersebut, maka akan dilakukan beberapa pengujian statistic, yaitu : (1) Uji signifikansi *Fixed effect* melalui Uji Chow atau Uji-F; dan (2) Uji signifikansi *Random effect* melalui Uji Hausman.

(1) Hasil Uji Chow

Uji Chow atau Uji-F digunakan untuk menentukan antara metode *Common effect* atau

Fixed effect sebagai metode yang tepat untuk melakukan analisis data panel. Berikut

perhitungan hasil regresi *Common Effect* dan *Fixed Effect* :

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.032696	(4,43)	0.0000
Cross-section Chi-square	37.554777	4	0.0000

Sumber : Diolah dari Eviews

Dari tampilan table diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk *cross section* > 0,0000 sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect*. Dari tampilan table diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk *cross section* < 0,0000 sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

(2) Hasil Uji Hausman

Selanjutnya untuk menentukan antara metode *Fixed effect* atau *Random effect* sebagai metode yang tepat untuk melakukan analisis data panel dilakukan melalui Uji Hausman. Berikut tabel hasil pengujian *Random effect* dengan Uji Hausman:

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.030366	5	0.0012

Sumber : Output EViews

Dari tabel di atas, nilai probabilitas < 0,05 sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

dapat disimpulkan bahwa hasil regresi terbebas dari masalah normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan. Autokorelasi.

Hasil Pengujian Metode Evaluasi Model

1. Kriteria Ekonometrika (Pengujian Asumsi Klasik)

Sebelum melakukan estimasi, maka dalam penelitian ini juga dilakukan beberapa uji asumsi klasik. Pada hasil uji asumsi klasik,

2. Kriteria Statistik

Sedangkan pengujian statistik dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), koefisien regresi secara individual (uji t), dan pengujian

koefisien secara serentak (uji F). Adapun analisis regresi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil estimasi, besarnya R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0.583223. Artinya variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi) dalam model sebesar 58,32 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam model yaitu Variabel Kemandirian keuangan daerah (X_1), dan Variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_2). Sementara sisanya sebesar 41,6 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

b. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Nilai F hitung sebesar 8,680401 sedangkan nilai F tabel yang dilihat dari tabel F $\alpha=5\%$ untuk $n=50$ dan $k=3$ (df pembilang = $k-1$, df penyebut = $n - k$) adalah sebesar 3.19506. Oleh karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak sehingga secara bersama-sama semua variabel bebas pada penelitian secara serentak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

c. Uji Signifikansi Individu (uji t)

Nilai t table dilihat dari $n=50$ dan $k=3$ yakni sebesar 1,65714. Berikut tabel uji signifikansi t ($\alpha=5\%$) :

Tabel 6. Uji Signifikansi t ($\alpha=5\%$) Belanja Modal

Analisis	t-statistik	t-tabel	Kesimpulan
X_1	-4.908045	1.67793	Signifikan
X_2	3.137377	1.67793	Signifikan

Sumber : Diolah dari hasil regresi

Dari model regresi di lampiran 1, terlihat bahwa secara individu Variabel Kemandirian keuangan daerah (X_1), dan Variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Hal ini mencerminkan bahwa daerah Sumatera bagian selatan telah sanggup mengelola keuangan secara mandiri sehingga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

3. Kriteria Ekonomi

Berdasarkan hasil olah data statistic, dapat dilihat bahwa Kemandirian keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dan model estimasi *Fixed Effect* menunjukkan bahwa pada periode penelitian yakni 2005-2014 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.583223 menunjukkan bahwa sebesar 58,32 persen pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variabel yang ada pada penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Secara parsial, masing-masing variabel mempunyai arah yang sesuai dengan teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. Kemampuan keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI, No.1, 2012, Hal. 1-19.
- Akai, Nobuo & Masayo Sakata. 2002. *Fiscal decentralization contributes to economic growth : evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.
- Badrudin, Rudi. 2012. Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.6. No.3. November (2012), Hal.249-264.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Ebel, Robert D. dan Seidar Yilmaz. 2002. *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute.*
<http://www.worldbank.org>.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Hariyanto, Dedy Tri. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi. Tesis FE Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI (tidak dipublikasikan).
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Manik, Rikwan E.S. & Paidi Hidayat. 2010. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Volume 2 No.3, November 2010.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Reksohadiprodo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa*

- Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret (2009), Vol.6 No.1. Hal 50-69.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Prov.Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret (2011), Hal.46-58.
- Solihin, Achmad & Niken Ajeng Lestari. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*, Tahun XX, No.1 April (2010).
- Sumarsono, Hadi & Hadi Utomo. 2009. Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol.1, No.3, (2009).
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Percetakan Andi Offset. Yogyakarta.
- Susetyo, Didik. 2010. Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional. *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada FE UNSRI*, Palembang 25 Mei (2010).
- Todaro MP, Stephen CS. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thiessen, Ulrich. 2003. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries*. *Fiscal Studies Volume 24 No.3*.
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.5, No.1, Oktober 2008 Hal.55-83.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.